

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA TIDORE KEPULAUAN 2018



**Badan Pusat Statistik
Kota Tidore Kepulauan**

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA TIDORE KEPULAUAN 2018



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA TIDORE KEPULAUAN 2018

No. Publikasi : 82720.2006

Katalog BPS : 4102002.8272

Ukuran Buku : 21,6 X 27,9 cm

Jumlah Halaman : viii + 40 Halaman

Naskah:

BPS Kota Tidore Kepulauan

Gambar Kulit:

BPS Kota Tidore Kepulauan

Diterbitkan Oleh:

© BPS Kota Tidore Kepulauan

Boleh dikutip dengan menyebutkan sumbernya

Kata Pengantar

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan publikasi “**Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tidore Kepulauan 2018**” dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Publikasi ini berisikan uraian singkat tentang capaian IPM Kota Tidore Kepulauan yang memberikan informasi tentang sejauh mana pembangunan telah dilaksanakan. Publikasi ini dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan kebijakan dan program pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sifat dari indikator-indikator sosial seperti bidang kesehatan dan pendidikan seringkali akan membutuhkan waktu yang lebih panjang bereaksi terhadap suatu kebijakan dibanding indikator ekonomi.

Publikasi ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen Badan Pusat Statistik dalam menyediakan indikator pembangunan berkelanjutan atau juga dikenal *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Dimana, indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) banyak digunakan sebagai indikator dalam SDGs.

Kami menyadari bahwa publikasi ini masih memerlukan banyak penyempurnaan. Oleh karena itu, setiap masukan yang bersifat konstruktif sangat kami hargai demi penyempurnaan isi publikasi di kemudian hari. Akhir kata semoga publikasi dimanfaatkan sebaik-baiknya.

Tidore , Oktober 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Tidore Kepulauan



Ir. Salahudin, M.Si

Tim Penyusun

Pengarah:

Ir. Salahuddin, M.Si

Penanggung Jawab Teknis:

Lusi Dwi Rianti, SST

Penyunting:

Fenty Dian Aryanti, SST

Penulis:

Bimo Aji Dimas Danindro, SST

Pengolah Data:

Bimo Aji Dimas Danindro, SST

Desain:

Bimo Aji Dimas Danindro, SST

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Tim Penyusun.....	iv
Daftar Isi.....	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Bab I	1
Pendahuluan	1
Konsep Pembangunan Manusia.....	1
Pengukuran Pembangunan Manusia	2
Bab II	5
Metodologi.....	5
Perkembangan Metodologi Penghitungan IPM.....	5
Mengapa metodologi IPM mengalami perubahan?	5
Apa Keunggulan IPM Metode Baru?.....	6
Implementasi IPM Metode Baru	7
Perubahan-perubahan yang dilakukan	7
Penentuan Nilai Maksimum.....	8
Penghitungan IPM.....	8
1) Dimensi Kesehatan.....	8
2) Dimensi Pendidikan.....	9
3) Dimensi Pengeluaran (Standar Hidup Layak)	11
Agregasi IPM.....	12
Laju Pertumbuhan IPM.....	12
Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia	13
Bab III Gambaran Umum.....	15
Sekilas Pandang Tidore Kepulauan	15
Sekilas Perekonomian Tidore Kepulauan.....	16
Capaian Pembangunan Manusia	16
Pertumbuhan Pembangunan Manusia	18
Bab IV	21

Pembangunan Manusia Menurut Dimensi	21
Capaian Pembangunan Pendidikan	22
Capaian Pembangunan Kesehatan	27
Capaian Pembangunan Ekonomi	30
Lampiran	35

<https://tikepkota.bps.go.id>

Daftar Tabel

Tabel 1. Perbandingan IPM Metode Lama dan Baru	7
Tabel 2. Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM	8
Tabel 3. Pertumbuhan IPM (Persen) Kabupaten/Kota Maluku Utara Tahun 2014-2017	19
Tabel 4. Pertumbuhan Komponen IPM Tidore Kepulauan 2014-2017	19
Tabel 5. Fasilitas Pendidikan Menurut Kecamatan dan Jenjang Pendidikan.....	22
Tabel 6. Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur di Kota Tidore Kepulauan, 2016-2017.....	25
Tabel 7. Persentase Penduduk Umur 0-23 Bulan (Baduta) yang Pernah Diberi ASI dan Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) menurut Jenis Kelamin, 2017.....	28
Tabel 8. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Merokok dan Rata-rata Batang Rokok yang Dihisap per Minggu menurut Kelompok Pengeluaran, 2017	28

Daftar Gambar

Gambar 1. Perbandingan IPM Kota Tidore Kepulauan, Ternate dan Maluku Utara	17
Gambar 2. Klasifikasi IPM Kabupaten/Kota di Maluku Utara	17
Gambar 3. Pertumbuhan IPM (persen) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015-2018	18
Gambar 4. Rata-rata Lama Sekolah Kota Tidore Kepulauan 2014-2018	26
Gambar 5. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014-2018	26
Gambar 6. Angka Harapan Hidup Kota Tidore Kepulauan 2014-2018	30
Gambar 7. Peranan (Distribusi) PDRB Menurut Lapangan Usaha Tidore Kepulauan, 2018	31
Gambar 9. Pengeluaran Per Kapita Kota Tidore Kepulauan 2014-2018	33

Bab I

Pendahuluan

| Konsep Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia merupakan tujuan akhir pembangunan sekaligus modal bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Hakikat pembangunan yaitu peningkatan kesejahteraan umum sudah termuat sebagai salah satu tujuan dalam pembukaan UUD'45. Hal tersebut menunjukkan posisi penting pembangunan manusia secara utuh.

Manusia merupakan tujuan akhir dari proses pembangunan karena pada dasarnya pembangunan suatu wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan hasil pembangunan manusia di wilayah tersebut akan menentukan keberlangsungan pembangunan kedepan. Hal tersebut karena kualitas manusia sebagai pelaku/aktor dalam proses pembangunan akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankan. Hal tersebut sejalan dengan pendapat *United Nations Development Programme* (UNDP) yang menyatakan bahwa manusia harus menjadi pusat dan tujuan akhir pembangunan.

Pembangunan Manusia pada dasarnya merupakan suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan manusia (UNDP, 2016). Secara khusus UNDP menyoroti masalah penciptaan masyarakat yang panjang umur dan sehat, berpengetahuan dan memiliki standar hidup yang layak sebagai dimensi kunci pembangunan manusia di suatu wilayah. Dalam hal ini, pembangunan manusia merupakan tujuan akhir dari berbagai pembangunan di berbagai bidang seperti ekonomi, sosial, politik, budaya hingga lingkungan.

Tidak sedikit pakar yang berpendapat bahwa pendapatan dapat mewakili (*proxy*) pilihan-pilihan lainnya. Tetapi pernyataan tersebut sudah tidak lagi relevan dengan jenis kebutuhan dasar masyarakat yang semakin beragam. Pendapatan dapat dipergunakan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan, menjaga/ meningkatkan kesehatan, namun pendapatan tidak dapat dijadikan sebagai indikator tunggal dalam melihat hasil pembangunan manusia. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor lain yang menentukan hasil capaian pembanguna di bidang kesehatan dan pendidikan selain faktor pendapatan.

Konsep pembangunan sumber daya manusia berfokus pada meningkatkan kemampuan atau memberdayakan manusia, bukan hanya pemanfaatan kemampuan tersebut. Sementara itu pendekatan pembangunan manusia mencakup keseluruhan aspek tersebut di atas. Dengan demikian konsep ini mampu mencakup lebih baik berbagai segi dan kompleksitas kehidupan manusia.

| Pengukuran Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan yang sudah ada kemudian mengundang pertanyaan. Bagaimana melihat atau mengukur hasil pembangunan secara kontinyu. Hal ini sangat diperlukan karena menurut konsep yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa pembangunan manusia merupakan tujuan akhir proses pembangunan sehingga dibutuhkan evaluasi secara berkala. Selain itu, ukuran hasil pembangunan juga harus dapat dibandingkan dengan negara lain sehingga tercipta keterbandingan internasional.

Adanya permasalahan tersebut maka melatarbelakangi UNDP untuk mengembangkan indikator pembangunan manusia yang mampu menjawab permasalahan tersebut. UNDP merumuskan *Human Development Index* (HDI) atau yang dikenal Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencakup 3 komponen dasar, yaitu:

- Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.
- Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).
- Standar kehidupan layak diukur dengan logaritma natural dari produk domestik bruto per kapita dalam paritasi daya beli.

Pada perkembangannya, UNDP mengembangkan konsep dan metodologi dalam penghitungan IPM guna melakukan perbaikan dan penyempurnaan. Beberapa perubahan yang terjadi selama periode 1990 sampai 2014 yaitu komponen angka melek huruf diganti dengan harapan lama sekolah, PDB atau PDRB yang digunakan untuk menghitung kualitas hidup layak diganti dengan PNB atau PNRB, dan metode penghitungan yang dulunya menggunakan rata-rata aritmatika pada saat ini menggunakan rata-rata geometri. Berbagai perbaikan metode penghitungan yang dilakukan semata-mata untuk mencari formulasi terbaik dalam pengukuran pembangunan manusia.

Adapun alasan mengapa Indonesia menjadikan IPM sebagai metode untuk menghitung tingkat pembangunan yang telah terjadi karena adanya kesepakatan bersama masyarakat internasional untuk mencapai pembangunan milenium atau yang sering disebut dengan Millenium Development Goals (MDG's). Komitmen tersebut telah disepakati oleh para pemimpin dunia Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada bulan September 2000 yang memuat delapan butir pernyataan sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;
3. Mendorong kesetaraan dan pemberdayaan gender;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesejahteraan ibu;
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup; dan
8. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.

Sebagai indikator komposit, IPM memiliki banyak manfaat. Manfaat tersebut antara lain:

- o IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
- o IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- o Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum.

Bab II

Metodologi

| Perkembangan Metodologi Penghitungan IPM

Sejak IPM diperkenalkan pada tahun 1990, telah dilakukan beberapa kali penyempurnaan penghitungan IPM. Hingga pada tahun 2010, UNDP telah banyak melakukan pembaruan metodologi penghitungan. Perubahan metodologi penghitungan IPM ini diikuti oleh beberapa negara diantaranya India di tahun 2011, Filipina tahun 2012, China di tahun 2013, serta Indonesia pada tahun 2014.

Pada awalnya IPM dikenal sebagai indeks komposit tunggal yang terdiri dari tiga komponen indeks yaitu Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Kemudian pada tahun 2010, secara umum IPM memiliki 2 perubahan besar. Perubahan pertama yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang menggantikan indikator AMH sebagai penyusun indeks pendidikan dan indikator Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang menggantikan PDRB per kapita sebagai penyusun indeks ekonomi. Perubahan kedua yaitu agregasi indeks yang menggunakan rata-rata geometrik, bukan lagi rata-rata aritmetik.

Mengapa metodologi IPM mengalami perubahan?

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. AMH sudah tidak relevan bila digunakan kembali sebagai ukuran pendidikan yang secara utuh sebab sudah tidak tepat lagi dalam menggambarkan kualitas pendidikan. Hal ini disebabkan karena AMH di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Hal tersebut tidak relevan dengan syarat indeks komposit yang harus mampu membedakan karakteristik objek.
2. PDB per kapita tidak lagi mampu menggambarkan pendapatan masyarakat antar daerah atau antar wilayah. Hal ini dikarenakan PDB tidak hanya memperlihatkan siklus perekonomian yang hanya dilakukan oleh masyarakat secara mikro, tetapi juga menggambarkan kondisi perekonomian yang lebih besar disumbang oleh perekonomian luar negeri, misalnya investasi yang notabene memiliki siklus yang hanya menyentuh kondisi perekonomian masyarakat tertentu.

3. Penghitungan IPM kembali menggunakan rata-rata geometrik sebab penggunaan rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Apa Keunggulan IPM Metode Baru?

1. Menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).
 - Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
 - PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.
2. Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama-sama penting.

<https://tikepkota.tidore.go.id>

Perubahan-perubahan yang dilakukan

Indonesia mengaplikasikan metode baru penghitungan IPM tersebut pada tahun 2015 dengan memperhatikan beberapa pertimbangan seperti:

1. Untuk dimensi kesehatan, telah tersedianya data Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir (e^0) hasil proyeksi Sensus Penduduk (SP2010).
2. Pada dimensi pengetahuan, perubahan indikator perlu dilakukan dengan adanya perubahan penimbang (*weight*) dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang merupakan sumber data penghitungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Cakupan pengukuran rata-rata lama sekolah juga mengalami perubahan yang sebelumnya mencakup penduduk usia 15 tahun ke atas menjadi penduduk usia 25 tahun ke atas. Perubahan tersebut mempertimbangkan kondisi masih banyaknya masyarakat yang melakukan pendidikan pada rentang usia 15-25 tahun.
3. Data PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga didekati dengan pengeluaran per kapita disesuaikan dengan menggunakan data Susenas.
4. Penentuan nilai maksimum dan minimum menggunakan Standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah.

Tabel 1. Perbandingan IPM Metode Lama dan Baru

DIMENSI	METODE LAMA		METODE BARU	
	UNDP	BPS	UNDP	BPS
1	2	3	4	5
Kesehatan	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)
Pengetahuan	Angka Melek Huruf (AMH)	Angka Melek Huruf (AMH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Harapan Lama Sekolah (HLS)
	Kombinasi Angka Partisipasi Kasar (APK)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Standar Hidup Layak	PDB per Kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)	PNB per Kapita (PPP US\$)	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)
Agregat	Rata-rata Hitung $IPM = \frac{1}{3} (Indeks_{Kesehatan} + Indeks_{Pendidikan} + Indeks_{Ekonomi})$		Rata-rata Ukur $IPM = \sqrt[3]{Indeks_{Kesehatan} \times Indeks_{Pendidikan} \times Indeks_{Pengeluaran}}$	

Penentuan Nilai Maksimum

Dalam menghitung IPM, setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum. Penentuan nilai minimum dan maksimum untuk masing- masing indikator menggunakan standar UNDP untuk keterbandingan global, kecuali standar hidup layak karena menggunakan ukuran rupiah. Berikut tabel yang menyajikan nilai tersebut:

Tabel 2. Nilai Minimum dan Maksimum Komponen IPM

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
1	2	3	4	5	6
Angka Harapan Hidup	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP\$)	10.007.436* (Rp)	107.721 (PPP\$)	26.572.352** (Rp)

Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli.

Keterangan:

- * Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara, Papua.
- ** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025.

Penghitungan IPM

1) Dimensi Kesehatan

Dimensi kesehatan diukur menggunakan Angka Harapan Hidup (AHH) saat lahir. AHH didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir hingga akhir hayatnya. AHH merupakan bagian dari pembangunan di bidang kesehatan karena AHH berhubungan erat dengan meningkatnya peluang lamanya kehidupan seseorang. Perbaikan sanitasi lingkungan, kesadaran masyarakat mengenai cara hidup sehat, dan pengobatan dengan cara medis dapat memperpanjang usia hidup atau harapan untuk hidup seseorang. Peningkatan usia hidup juga indikator

dari semakin majunya tingkat sosial ekonomi masyarakat sehingga AHH mewakili indikator kesehatan dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat.

AHH dihitung dengan menggunakan tabel kematian (*life table*) dengan input data orang/penduduk yang meninggal berdasarkan kelompok umur. Penggunaan tabel kematian berhubungan dengan *kohort* peristiwa pada suatu waktu tertentu. Selain dengan tabel kematian, AHH dapat dihitung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*. Penghitungan dengan program ini biasanya disebut perhitungan tidak langsung karena menggunakan input data jumlah wanita usia 15 – 49 tahun per kelompok umur lima tahunan.

Indeks kesehatan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Keterangan:

AHH_{min} : Angka Harapan Hidup minimal, yaitu 20 tahun

AHH_{maks} : Angka Harapan Hidup maksimal, yaitu 85 tahun

2) Dimensi Pendidikan

Dimensi pendidikan diukur dengan dua indikator, yakni Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) - (*Mean Years of Schooling* – MYS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam penghitungannya, RLS mengasumsikan bahwa dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah di suatu wilayah tidak akan turun, atau dengan kata lain konstan.

Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Indeks RLS dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Keterangan:

RLS_{min} : Rata-rata Lama Sekolah minimal, yaitu 0

RLS_{maks} : Rata-rata Lama Sekolah maksimal, yaitu 15

Harapan Lama Sekolah (HLS) - (Expected Years of Schooling – EYS)

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan yang menjadi kebijakan pemerintah, yaitu program wajib belajar.

Penghitungan HLS menggunakan asumsi bahwa kemungkinan anak untuk tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

HLS secara langsung dapat mengukur pembangunan sistem pendidikan di setiap jenjang, sehingga mampu menggambarkan pada level mana yang menjadi prioritas pemerintah.

Indeks HLS dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Keterangan:

HLS_{min} : Harapan Lama Sekolah minimal, yaitu 0

HLS_{maks} : Harapan Lama Sekolah maksimal, yaitu 18

Faktor Koreksi Pesantren (FKP)

FKP merupakan komponen baru dalam penghitungan angka IPM yang tercakup dalam HLS. Hal ini dikarenakan HLS menyesuaikan dengan kondisi Indonesia dimana terdapat anak sekolah sekaligus mengenyam pondok pesantren sehingga perlu memperhitungkan lama mukim atau lama mondok dalam penghitungan rasio murid (santri) bermukim serta jumlah yang sedang bersekolah dan bermukim (mondok).

Tahapan dalam menghitung FKP adalah dengan merasiokan jumlah santri bermukim dengan jumlah santri seluruhnya sehingga diperoleh rasio santri mukim.

$$\text{Rasio Santri Mukim} = \frac{\text{Jumlah bermukim}}{\text{Jumlah Santri Seluruhnya}}$$

Kemudian dicari jumlah santri yang bersekolah dan bermukim dengan mengalikan Rasio Santri Mukim dengan jumlah santri yang bersekolah.

$$\text{Jumlah Santri Sekolah dan Mukim} = \text{Rasio Santri Mukim} \times \text{Jumlah santri Sekolah}$$

Terakhir untuk memperoleh Faktor Koreksi Pesantren didapat dengan merasiokan Jumlah Santri Sekolah dan Mukim dengan jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas ditambah dengan 1.

$$\text{FKP} = \frac{\text{Jumlah Santri Mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$$

Kemudian untuk memperoleh indeks pendidikan digunakan rumus sebagai berikut

$$I_{\text{pengetahuan}} = \frac{I_{\text{RLS}} + I_{\text{HLS}}}{2}$$

3) Dimensi Pengeluaran (Standar Hidup Layak)

Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas pada setiap level provinsi hingga kabupaten/kota.

Agar tidak terpengaruh fluktuasi atau volatilitas harga setiap tahunnya, maka rata-rata pengeluaran per kapita dikonstankan sehingga menggambarkan rata-rata pengeluaran per kapita riil. Caranya dengan membuat rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012 = 100.

Perhitungan *Power Purchasing Parity* (PPP) / paritas daya beli pada metode lama menggunakan 27 komoditas yang digunakan dalam menghitung nilai PPP. Namun dengan metode baru, penghitungan PPP mencakup 96 komoditas, dimana 66 komoditas merupakan komoditas berupa makanan dan 30 jenis komoditas merupakan non-makanan.

Pada metode lama, *share* 27 komoditas terus menurun dari sebesar 37,52 persen di tahun 1996 menjadi 24,66 persen di tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa 27 komoditas tersebut perlu ditambah agar setidaknya telah mencapainya syarat kecukupan untuk digunakan dalam menghitung angka PPP sebagai bahan baku penghitungan angka pengeluaran per kapita riil.

Formula yang digunakan dalam penghitungan angka PPP adalah sebagai berikut:

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{\frac{1}{m}}$$

Keterangan:

p_{ik} : harga komoditas i di wilayah referensi, yaitu Jakarta Selatan

p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j

m : jumlah komoditas

Sementara itu dimensi standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan dihitung menggunakan indeks pengeluaran dengan rumus sebagai berikut:

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Keterangan:

$\text{pengeluaran}_{\min}$: pengeluaran minimal per kapita yang disesuaikan, yaitu Rp 10.007.436

$\text{pengeluaran}_{\max}$: pengeluaran maksimal per kapita yang disesuaikan, yaitu Rp 26.572.352

Agregasi IPM

IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran.

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

Laju Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

Pertumbuhan IPM yang bernilai positif menunjukkan terjadi kenaikan IPM dibandingkan tahun sebelumnya, semakin besarnya menunjukkan pertumbuhan yang terjadi semakin cepat. Begitu sebaliknya jika nilai pertumbuhan IPM negatif menunjukkan terjadi penurunan nilai IPM dibandingkan tahun sebelumnya, semakin besar nilainya menunjukkan penurunan yang terjadi semakin besar. Istilah yang biasanya digunakan dalam pertumbuhan adalah terjadinya pertumbuhan secara cepat atau terjadi pelambatan.

Klasifikasi Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengelompokkan capaian pembangunan manusia di suatu wilayah, diperlukan klasifikasi yang mampu membedakan tingkat capaian pembangunan manusia antar wilayah. Pengklasifikasian pembangunan manusia ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- Sangat Tinggi ($IPM \geq 80$)
- Tinggi ($70 \leq IPM < 80$)
- Sedang ($60 \leq IPM < 70$)
- Rendah ($IPM < 60$)

Bab III

Gambaran Umum

Sekilas Pandang Tidore Kepulauan

Secara astronomis, Kota Kepulauan Tidore terletak pada 0°- 20° Lintang Utara hingga 0°- 50° Lintang Selatan dan pada posisi 127°10'- 127°45' Bujur Timur. Seluruh kawasan di daerah ini dikelilingi oleh laut dan mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Halmahera Selatan
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Halmahera Timur dan Kabupaten Halmahera Tengah
- Sebelah Barat dengan Kota Ternate.

Kota Kepulauan Tidore dan juga umumnya daerah di Provinsi Maluku Utara mempunyai tipe iklim tropis, sehingga sangat dipengaruhi oleh iklim laut yang biasanya heterogen sesuai indikasi umum iklim tropis.

Secara Administratif, Kota Tidore Kepulauan terbagi menjadi 8 Kecamatan. Dari 8 Kecamatan tersebut kemudian dipecah lagi menjadi 49 Desa dan 40 Kelurahan. Kecamatan Tidore Utara memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak dengan 4 desa dan 10 kelurahan.

Kota Kepulauan Tidore memiliki daratan dengan luas mencapai 1.550,37 km². Kecamatan Oba Tengah merupakan kecamatan dengan daratan terluas, yaitu sebesar 424 km². Kemudian Kecamatan Oba menjadi kecamatan dengan daratan terluas kedua yaitu sebesar 403,67 km². Sedangkan Kecamatan Tidore Timur merupakan kecamatan dengan luas daratan terkecil yaitu 34 km² atau hanya 2,19 persen total luas daratan Kota Tidore Kepulauan.

Dengan Luas Daratan tersebut, total terdapat lebih dari 100 ribu jiwa yang menduduki wilayah Tidore Kepulauan. Sehingga secara rata-rata terdapat 65 penduduk setiap km². Dalam hal ini wilayah Tidore Kepulauan secara umum masih tergolong belum padat.

Menurut persebaran penduduk di Kota Tidore Kepulauan tahun 2018, 18 persen penduduk atau sekitar 18,8 ribu jiwa terdapat di Kecamatan Tidore sebagai Kecamatan

dengan jumlah penduduk terbanyak. Kemudian diikuti Kecamatan Tidore Utara dengan jumlah penduduk mencapai 14,7 ribu jiwa atau sekitar 14,7 persen total keseluruhan penduduk Tidore Kepulauan. Sementara itu, Kecamatan Oba Selatan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terkecil sekitar 5,5 ribu jiwa.

Dengan jumlah penduduk terbesar, pada 2018 Kecamatan Tidore menjadi wilayah terpadat di Tidore Kepulauan. Pada wilayah tersebut rata-rata terdapat 520 jiwa penduduk setiap km². Sementara itu, Kecamatan Oba Tengah yang memiliki luas wilayah terbesar merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil di Tidore Kepulauan. Di wilayah Oba Tengah rata-rata hanya terdapat 24 jiwa penduduk setiap km². Fakta tersebut menunjukkan masih terdapat ketimpangan persebaran penduduk antar kecamatan.

Sekilas Perekonomian Tidore Kepulauan

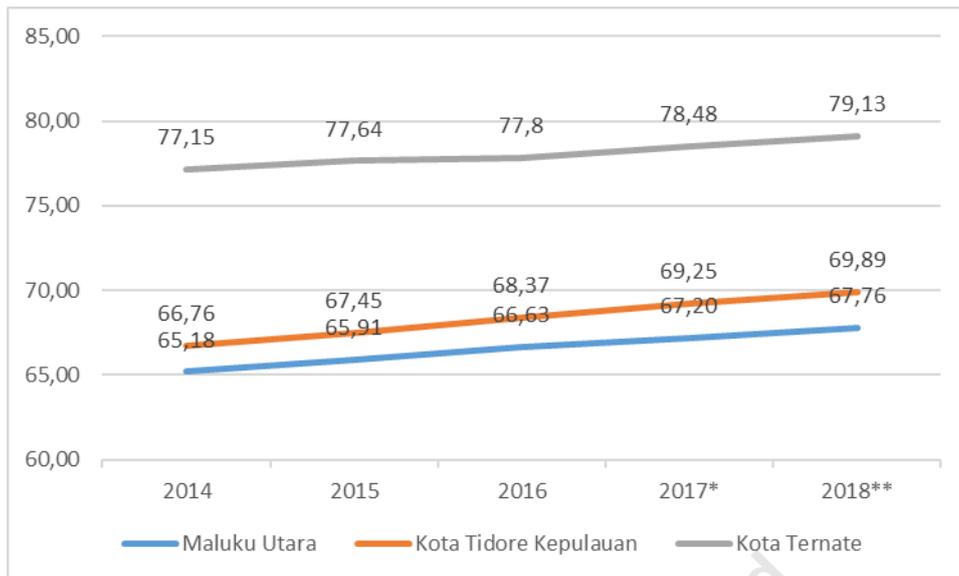
Perekonomian Tidore Kepulauan 2018 memiliki Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp 2,67 Triliun. Artinya rata-rata penduduk Kota Tidore Kepulauan memiliki pendapatan perkapita sebesar Rp 26,63 Juta per tahun.

Secara umum penciptaan nilai ekonomi di wilayah ini masih didominasi sektor Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (36,13 persen) serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 24,74 persen. Sektor lain yang memiliki kontribusi lebih dari 10 persen hanya sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (11,88 persen). Selain ketiga sektor tersebut, kontribusi terhadap penciptaan PDRB dibawah 10 persen.

Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan Kota Tidore Kepulauan mencapai Rp 1,89 Triliun. Nilai tersebut tumbuh sekitar 6,10 persen dibandingkan tahun 2017. Hal ini menjadi modal yang baik bagi perekonomian Tidore Kepulauan karena selama 5 tahun terakhir, Kota Tidore Kepulauan selalu memiliki nilai pertumbuhan di atas 5 persen.

Capaian Pembangunan Manusia

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, saat ini Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator capaian pembangunan yang diakui di berbagai belahan dunia. Dengan segala kekurangannya, IPM saat ini dianggap sebagai salah satu indikator yang paling komprehensif dalam menggambarkan pembangunan manusia.



Gambar 1. Perbandingan IPM Kota Tidore Kepulauan, Ternate dan Maluku Utara

Berdasarkan grafik di atas, capaian pembangunan manusia di Kota Tidore Kepulauan sejak 2014 hingga saat ini masih terkategori sedang. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki dari upaya pembangunan manusia di wilayah ini.

Capaian pembangunan Kota Tidore Kepulauan masih jauh tertinggal dibandingkan tetangganya Kota Ternate, hal tersebut mengindikasikan masih ada tantangan dan peluang optimalisasi pembangunan manusia bagi pemerintah khususnya pemerintah daerah. Pada 2019, capaian pembangunan Kota Tikep sebesar 69,86 poin, tertinggal lebih dari 9 poin dari Kota Ternate yang mencapai 79,13 poin pada periode yang sama.

Kemudian pada 2018, Indeks Pembangunan Manusia meningkat ke 69,89 poin. Nilai tersebut juga masih tertinggal dari Kota Ternate yang mencapai 79,13. Namun sedikit lebih tinggi dibandingkan IPM Maluku Utara secara umum yang hanya mencapai 67,76.



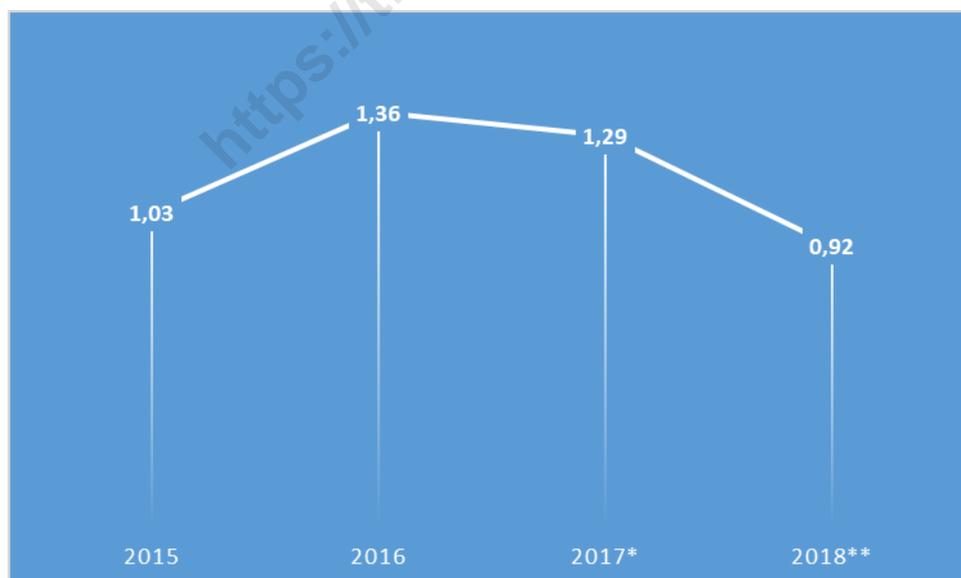
Gambar 2. Klasifikasi IPM Kabupaten/Kota di Maluku Utara

Capaian pembangunan di Kota Tidore Kepulauan lebih tinggi dari capaian pembangunan Maluku Utara secara umum. Namun jika dibandingkan dengan wilayah tetangganya yaitu Kota Ternate, capaian pembangunan Kota Tidore Kepulauan masih jauh tertinggal. Sejak 2010, capaian pembangunan manusia Kota Ternate sudah terkategori tinggi.

Dilihat dari grafik di atas, dapat dilihat bahwa capaian pembangunan manusia Kota Tidore Kepulauan bersama dengan kabupaten lain di Maluku Utara masih terkategori sedang. Di wilayah Maluku Utara hanya Kota Ternate yang sudah terkategori tinggi pembangunan manusianya.

Pertumbuhan Pembangunan Manusia

Salah satu cara untuk mengetahui kinerja pembangunan suatu daerah dari waktu ke waktu dapat dilihat dari pertumbuhan IPMnya. Pertumbuhan IPM akan menunjukkan seberapa besar perubahan yang terjadi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Adanya informasi ini dapat dijadikan evaluasi tahunan terkait kinerja dan keefektifan program yang telah dilaksanakan. Hal tersebut nantinya dapat dijadikan dasar dalam perumusan dan perencanaan kebijakan untuk periode selanjutnya.



Gambar 3. Pertumbuhan IPM (persen) Kota Tidore Kepulauan Tahun 2015-2018

Pertumbuhan IPM Kota Tidore Kepulauan dalam 4 tahun terakhir selalu bergerak positif. Pertumbuhan yang selalu positif menunjukkan setiap tahun IPM Tidore Kepulauan selalu mengalami kenaikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun terjadi perbaikan kualitas hidup manusia yang ada di Tidore Kepulauan.

Pertumbuhan IPM Tidore Kepulauan dalam 4 tahun terakhir juga cenderung berfluktuasi. Pada 2015 pertumbuhannya hanya sekitar 0,69 persen, sedangkan pada 2017 sudah mencapai 1,03 persen.

Tabel 3. Pertumbuhan IPM (Persen) Kabupaten/Kota Maluku Utara Tahun 2015-2018

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Halmahera Barat	1,47	1,37	0,56	0,55
Halmahera Tengah	0,94	1,58	1,33	1,21
Kepulauan Sula	0,53	1,24	1,29	1,48
Halmahera Selatan	1,52	1,49	0,76	1,20
Halmahera Utara	1,34	1,51	0,76	1,17
Halmahera Timur	1,15	1,45	1,31	0,65
Pulau Morotai	1,59	1,01	1,40	1,12
Pulau Taliabu	1,66	0,69	0,63	1,08
Kota Ternate	0,64	0,21	0,87	0,83
Kota Tidore Kepulauan	1,03	1,36	1,29	0,92
Maluku Utara	1,12	1,09	0,86	0,83

IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara memiliki pertumbuhan yang selalu positif selama periode 2015 sampai 2018. Hal tersebut menunjukkan telah terjadi kenaikan kualitas pembangunan manusia di seluruh wilayah Provinsi Maluku Utara.

Tabel 4. Pertumbuhan Komponen IPM Tidore Kepulauan 2015-2018

Komponen	2015	2016	2017*	2018**
Angka Harapan Hidup	0,15	0,16	0,15	0,34
RLS	2,18	2,24	3,07	2,56
HLS	1,38	3,54	1,16	0,07
Pengeluaran per Kapita	2,37	1,85	3,50	2,34

Analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengetahui sumbangsih masing-masing komponen terhadap laju IPM Kota Tidore Kepulauan. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat laju pertumbuhan untuk semua komponen IPM bertanda positif.

Secara umum sejak 2014 hingga 2018, pertumbuhan komponen IPM tertinggi ada pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per kapita. Hal tersebut merupakan cerminan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan dan peningkatan penyediaan akses pendidikan yang lebih baik. Sementara itu

pengeluaran per kapita yang terus meningkat menunjukkan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat Tidore Kepulauan.

Komponen Harapan lama sekolah juga memiliki laju pertumbuhan yang cukup tinggi. Bahkan pada tahun 2016 pertumbuhannya mencapai 3,54 persen. Pertumbuhan harapan lama sekolah menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Pendidikan.

<https://tikepkota.bps.go.id>

Bab IV

Pembangunan Manusia Menurut Dimensi

Kualitas pembangunan manusia sangat berperan penting dalam proses pembangunan di suatu wilayah. Kualitas pembangunan manusia merupakan modal sekaligus ukuran keberhasilan pembangunan. Dari uraian di atas, urgensi pembangunan manusia menjadi sangat penting dalam terminologi pembangunan kewilayahan.

Kualitas pembangunan manusia sebagai modal pembangunan erat kaitannya dengan *human capital*. Menurut Becker (1993), manusia bukan hanya sumber daya, namun merupakan modal (*capital*) yang akan menghasilkan pengembalian (*return*) dan setiap kegiatan mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan investasi. Becker menambahkan bahwa *human capital* dapat langsung digunakan dalam proses produksi. Lebih jelasnya, *human capital* dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dalam berbagai jenis pekerjaan, organisasi, dan situasi.

Sementara itu, kualitas pembangunan manusia sebagai ukuran keberhasilan pembangunan sangat berkaitan dengan tujuan pembangunan itu sendiri. Tujuan akhir dari pembangunan di segala bidang adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Para pendiri bangsa menyadari urgensi hal tersebut, sehingga peningkatan kesejahteraan umum menjadi salah satu tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan UUD'45. Bagaimanapun pembangunan dilakukan dengan segala daya upaya, tapi jika kesejahteraan masyarakat tidak berubah ke arah yang lebih baik maka dapat dikatakan bahwa proses pembangunan belum mampu mencapai tujuan akhirnya.

Capaian pembangunan dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan manusia di masing-masing dimensinya. Dalam IPM, terdapat 3 (tiga) dimensi yang menjadi acuan keberhasilan pembangunan manusia, yaitu pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Ketiga dimensi itu dipandang sebagai dimensi pokok dalam terminologi pembangunan manusia.

Dalam penghitungan IPM metode baru, digunakan metode agregasi rata-rata ukur, bukan lagi rata-rata hitung. Penggunaan metode tersebut dimaksudkan supaya kedudukan masing-masing dimensi dalam membentuk IPM menjadi sama-sama penting dan tidak ada bias saling menggantikan antar dimensi.

Capaian Pembangunan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan manusia. Dalam terminologi ini, pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Pendidikan merupakan komponen penting dalam pembangunan manusia. Indikator Pendidikan berimplikasi dalam hal kesiapan dan kapasitas manusia untuk berperan tidak hanya menjadi obyek pembangunan tetapi juga sekaligus menjadi subyek dan *ultimate beneficiary* pembangunan itu sendiri.

Pada sub-bab ini akan dibahas status pembangunan pendidikan di Kota Tidore Kepulauan berdasarkan data, indikator, dan analisisnya, khususnya dalam konteks kontribusinya terhadap capaian pembangunan manusia sebagaimana diukur dengan IPM. Namun, analisis akan disajikan lebih dari sekedar menjelaskan perannya dalam mempengaruhi IPM, tetapi dalam konteks pembangunan secara umum. Indikator yang digunakan merupakan alat ukur yang menunjukkan status pembangunan pendidikan, yaitu angka partisipasi sekolah, rata-rata lama bersekolah, harapan lama sekolah, dan lainnya sampai dengan fasilitas pendidikan. Analisis yang lebih luas diharapkan dapat memberi informasi yang lebih detail, khususnya dalam kaitan kepentingan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan sumber daya manusia pada umumnya.

Salah satu cerminan dan faktor kunci dalam pembangunan dimensi pendidikan merupakan partisipasi dari masyarakat itu sendiri dalam proses Pendidikan. Angka rata-rata dan harapan lama sekolah yang menjadi proksi dalam pengukuran pembangunan manusia juga sangat berkaitan dengan bagaimana partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan indikator yang relevan digunakan dalam melihat partisipasi penduduk dalam pembangunan bidang Pendidikan.

APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non-Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan. Angka Partisipasi Murni menunjukkan bagaimana akses pendidikan pada kelompok umur yang bersesuaian dengan setiap jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Pada pembahasan kali ini, penulis melihat data APM pada tahun 2017 dan 2018 untuk melihat potret pendidikan di Kota Tidore Kepulauan.

Tabel 5. Perkembangan APM Kota Tidore Kepulauan Tahun 2017-2018

Jenjang Pendidikan	2017	2018		
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki dan Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sekolah Dasar	97.43	94.11	97.87	95.90
Sekolah Menengah Pertama	76.75	73.52	78.21	75.76
Sekolah Menengah Atas	76.51	69.38	78.03	73.80

Dari Tabel di atas dapat dilihat untuk jenjang Sekolah Dasar, Angka Partisipasi Murni sudah cukup baik. Meskipun pada 2018 sedikit mengalami penurunan dari 97,43 persen pada tahun sebelumnya menjadi 95,90 persen. Sedangkan sekitar 2-5 persen penduduk lainnya yang tidak/belum bersekolah salah satunya adalah penduduk yang belum mencapai usia 7 tahun ketika periode masuk tahun ajaran baru. Hal tersebut mengakibatkan pada periode pencacahan penduduk sudah mencapai usia 7 tahun namun belum bersekolah karena harus menunggu tahun ajaran berikutnya.

Kemudian pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama, APM mencapai 75,76 persen pada 2018. Nilai tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yaitu 76,75 persen. Nilai tersebut menandakan pada jenjang ini partisipasi penduduk Tidore Kepulauan mulai menurun dibandingkan jenjang pendidikan dasar. Salah satu faktor yang mengakibatkan adalah adanya sebagian penduduk Tidore Kepulauan yang mengikuti pendidikan dasar namun tidak melanjutkan pada jenjang pendidikan menengah pertama.

Pada jenjang pendidikan menengah atas, APM mencapai 73,80 persen. Nilai tersebut juga lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 76,51 persen. Namun perbedaan APM pada jenjang pendidikan menengah atas dan pendidikan menengah pertama tidak sebesar perbedaan pendidikan menengah pertama dan pendidikan dasar. Hal tersebut menandakan ada kecenderungan penduduk yang mengenyam pendidikan menengah pertama akan melanjutkan ke pendidikan jenjang menengah atas.

Penurunan partisipasi yang dimulai pada jenjang pendidikan menengah pertama menunjukkan sekolah pada jenjang ini membutuhkan perhatian lebih lanjut. Salah satu faktor yang memengaruhi partisipasi adalah ketersediaan fasilitas pendidikan seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan MTs (Madrasah Tsanawiyah).

Tabel 6. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Menengah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2018

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
1	2	3	4
Tidore Selatan	6	721	104
Tidore Utara	7	1189	146
Tidore	5	1268	113
Tidore Timur	2	424	41
Oba	8	776	77
Oba Selatan	5	432	45
Oba Utara	8	1216	100
Oba Tengah	9	621	90
Tidore Kepulauan	50	6658	716

Dilihat dari fasilitas pendidikan tingkat menengah pertama seperti SMP dan MTs jumlahnya sudah cukup memadai. Namun jika dilihat lebih jauh, persebaran sekolah tingkat menengah pertama per kecamatan belum merata. Kecamatan Tidore yang memiliki jumlah murid SMP/MTs mencapai 1.268 siswa atau yang tertinggi diantara kecamatan lainnya hanya memiliki 5 sekolah dengan 113 guru. Sedangkan di wilayah Oba yang memiliki 776 siswa SMP/MTs malah memiliki jumlah sekolah yang lebih banyak yaitu 8 sekolah dan 77 guru.

Perbedaan aksesibilitas wilayah mungkin menjadi salah satu faktor ketidakseimbangan penempatan SMP/MTs, namun hal tersebut menunjukkan perencanaan pendidikan yang masih harus diperbaiki. Dilihat dari kepadatan penduduknya, seharusnya kecamatan Tidore memiliki sekolah dan guru yang lebih dibandingkan kecamatan lainnya.

Secara rasio guru-murid di wilayah Tidore Kepulauan sebenarnya sudah cukup baik. Namun yang perlu diperhatikan lebih jauh adalah pemerataan persebaran guru serta pemerataan kualitas guru itu sendiri. Karena dalam era perkembangan teknologi seperti sekarang ini guru dituntut dapat melakukan inovasi dalam proses belajar mengajar. Untuk itu, peningkatan wawasan dan kompetensi guru menjadi sebuah keharusan dalam era modern seperti sekarang ini.

Setelah pada pembahasan sebelumnya publikasi ini membahas APM dan ketersediaan Fasilitas formal. Pada pembahasan ini selanjutnya akan dibahas Angka Partisipasi sekolah (APS) menurut kelompok umur sebelum membahas RLS.

Tabel 7. Angka Partisipasi Sekolah menurut Kelompok Umur di Kota Tidore Kepulauan, 2017 dan 2018

Kelompok Umur	2017	2018		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7-12	97.43	97.47	97.87	97.66
13-15	97.23	96.34	100.00	98.09
16-18	84.95	76.73	78.11	77.44

Dilihat dari APS pada 2017, terjadi kecenderungan penurunan angka partisipasi seiring dengan meningkatnya kelompok umur. Pada kelompok umur 7 hingga 12 tahun, angka partisipasi sekolah mencapai 97,43 persen. Artinya sekitar 97 persen penduduk usia 7 hingga 12 tahun aktif mengenyam pendidikan.

Untuk kelompok umur yang lebih tinggi yaitu 13-15 tahun, angka partisipasi sekolah relatif. Pada kelompok umur ini, angka partisipasi sekolah sebesar 97,23 persen. Artinya sekitar 97 persen penduduk usia 13 hingga 15 tahun di Tidore Kepulauan aktif mengenyam pendidikan.

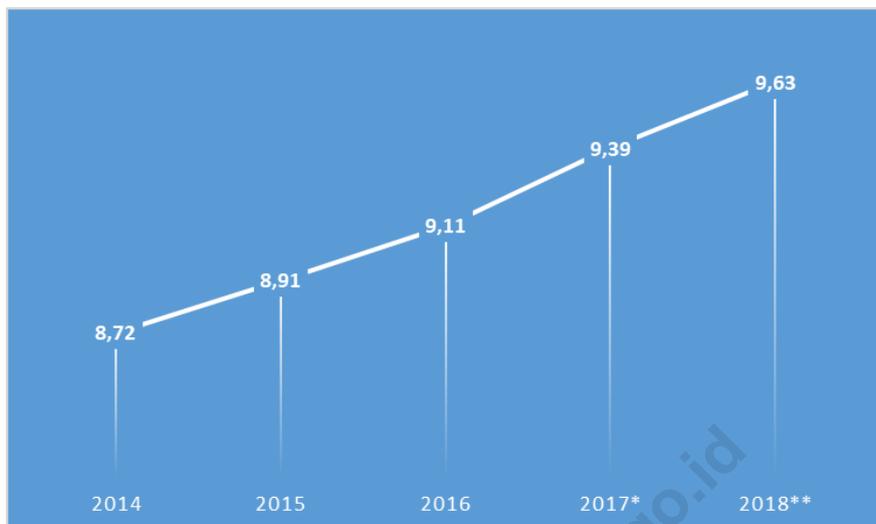
Kemudian hanya sekitar 84,95 persen masyarakat usia 16-18 tahun di Tidore Kepulauan yang aktif mengenyam pendidikan. Hal ini sejalan dengan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tidore Kepulauan pada 2017 yang hanya sebesar 9,39 Tahun atau hingga tamat SMP.

Sedangkan dilihat dari APSnya, pada 2017 mengalami sedikit penurunan pada partisipasi kelompok umur 16-18 tahun. Pada kelompok ini, APSnya hanya sekitar 77,44 persen. Dilihat dari kondisi per jenis kelamin, partisipasi perempuan lebih tinggi dengan nilai 78,11 persen. Sedangkan partisipasi laki-laki sedikit lebih rendah yaitu sebesar 76,73 persen.

Kemudian beranjak ke kelompok umur yang lebih muda yaitu 13-15 tahun, Angka Partisipasi Sekolah (APS) meningkat menjadi 98,09 persen. Apabila dibedah menurut jenis kelamin, partisipasi sekolah pada kelompok umur ini memiliki karakteristik yang sama dengan kelompok umur di atasnya. APS Laki-laki lebih rendah yaitu sebesar 96,34 persen dibandingkan dengan APS Perempuan yang mencapai 100 persen.

Pada kelompok umur 7-12 tahun, angka partisipasi sekolah hanya mencapai 97,66 persen. Nilai tersebut terbentuk dari APS laki-laki yang mencapai 97,47 persen, dan milik

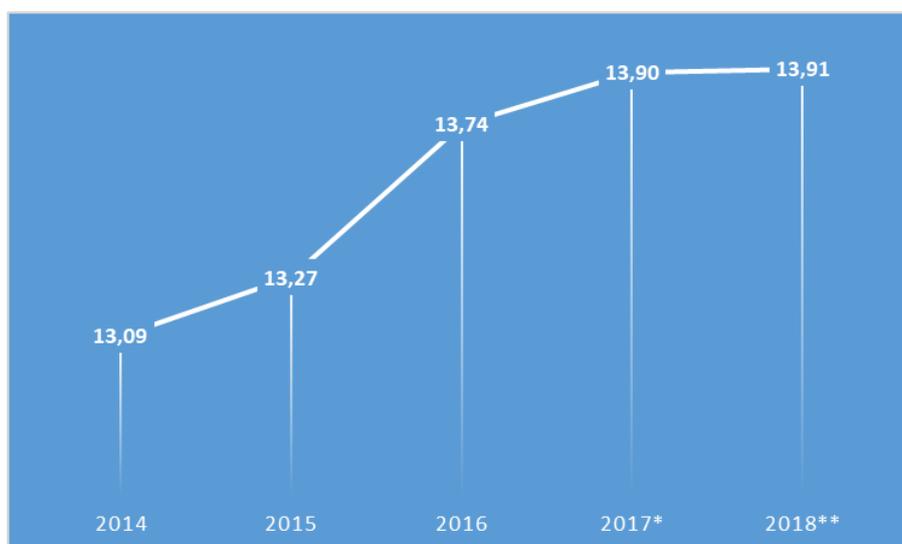
perempuan yang mencapai 97,87 persen. Hal tersebut menunjukkan pada kelompok umur ini, kesadaran pendidikan masyarakat masih tinggi.



Gambar 4. Rata-rata Lama Sekolah Kota Tidore Kepulauan 2014-2018

Pada 2018, RLS Masyarakat Kota Tidore Kepulauan meningkat menjadi 9,63 tahun. Perkembangan indikator RLS sebagai salah satu komponen pendidikan dalam IPM di Tidore Kepulauan cukup lambat. Hal tersebut mengingat RLS sebagai indikator sosial yang membutuhkan waktu cukup lama untuk mengalami perubahan.

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat dijadikan gambaran kualitas pendidikan di Tidore Kepulauan. Kondisi Pendidikan di Tidore Kepulauan secara umum pada 2018 harus lebih ditingkatkan. Hal tersebut dapat disimpulkan dari jauhnya ketimpangan antara Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).



Gambar 5. Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Tidore Kepulauan, Tahun 2014-2018

HLS masyarakat di Tidore Kepulauan sudah mencapai 13,91 Tahun atau hingga jenjang D2/D3. Realita ini cukup jauh dibandingkan dengan realitas kondisi pendidikan secara umum yang secara rata-rata hanya mencapai jenjang SMP.

Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sejak tahun 2014 juga cenderung lambat mengingat sifatnya sebagai indikator sosial. Pada tahun 2014, HLS masyarakat di Tidore Kepulauan sebesar 13,09 tahun atau hingga tamat D1. Kemudian pada 2018, HLS meningkat menjadi 13,91 Tahun. Artinya secara perlahan masyarakat Tidore Kepulauan sudah mulai menyadari pentingnya pendidikan tinggi untuk perbaikan kehidupan kedepan.

Capaian Pembangunan Kesehatan

Kesehatan merupakan modal yang penting bagi setiap manusia untuk berupaya meningkatkan kualitas hidupnya. Tanpa jiwa dan raga yang sehat, seseorang akan kesulitan untuk melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Pada sub-bab ini akan dibahas status pembangunan kesehatan di Kota Tidore Kepulauan berdasarkan data, indikator, dan analisisnya, khususnya dalam konteks kontribusinya terhadap capaian pembangunan manusia sebagaimana diukur dengan IPM. Namun, analisis akan disajikan lebih dari sekedar menjelaskan perannya dalam mempengaruhi IPM, tetapi dalam konteks pembangunan secara umum. Indikator yang digunakan merupakan alat ukur yang menunjukkan status pembangunan kesehatan, yaitu angka harapan hidup (AHH) beserta indikator lain seperti Angka kesakitan dan Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan. Analisis yang lebih luas diharapkan dapat memberi informasi yang lebih detail, khususnya dalam kaitan kepentingan perencanaan pembangunan di bidang kesehatan dan sumber daya manusia pada umumnya.

Capaian pembangunan kesehatan tidak bisa dilepaskan dari angka kesakitan sebagai salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat tingkat pembangunan kesehatan Penduduk. Semakin tinggi angka kesakitan maka semakin buruk capaian pembangunan di bidang kesehatan.

Tabel 8. Angka Kesakitan menurut Karakteristik, 2018

Karakteristik	Angka Kesakitan
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	17.73
Perempuan	18.12
Kuintil Pengeluaran	
40 persen Terbawah	19.63
40 persen Tengah	17.42
20 persen Teratas	15.51
Kota Tidore Kepulauan	17.92

Sumber: SUSENAS Maret 2018

Semakin kecilnya angka kesakitan menunjukkan kualitas kesehatan yang semakin baik. Secara umum angka kesakitan di wilayah Kota Tidore Kepulauan mencapai 17,92 persen, artinya setiap 100 penduduk, terdapat 17-18 jiwa yang mengalami keluhan kesehatan. Apabila dilihat menurut karakteristik jenis kelamin, angka kesakitan laki-laki sebesar 17,73 persen sedikit lebih rendah dibandingkan perempuan yang mencapai 18,12 persen. Hal tersebut menunjukkan laki-laki lebih resisten terhadap keluhan kesehatan ketimbang perempuan.

Sementara itu dilihat dari karakteristik pengeluaran, ada kecenderungan semakin besar pengeluaran penduduk maka akan semakin kecil angka kesakitannya. Pada kuintil pengeluaran 40 persen terbawah, angka kesakitan mencapai 19,63 persen. Sedangkan pada kuintil pengeluaran 40 persen tengah mencapai 17,42 persen. Sedangkan pada 20 persen kuintil teratas memiliki angka kesakitan 15,51 persen. Dengan mengasumsikan pengeluaran sebagai proksi pendapatan, sehingga terdapat kecenderungan semakin tinggi tingkat kesejahteraan penduduk, semakin kecil pula peluang mengalami keluhan kesehatan.

Masih relatif rentannya masyarakat terhadap keluhan kesehatan menandakan diperlukannya akses kesehatan yang memadai. Posisi Jaminan Kesehatan untuk keperluan berobat jalan menjadi sangat penting. Karena dengan adanya jaminan kesehatan khususnya bagi masyarakat pra-sejahtera, akses berobat bagi penduduk dengan keluhan kesehatan menjadi lebih mudah.

Jaminan kesehatan adalah program bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan. Menurut UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, jaminan kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Tabel 9. Persentase Penduduk yang Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan Menurut Karakteristik tahun 2018

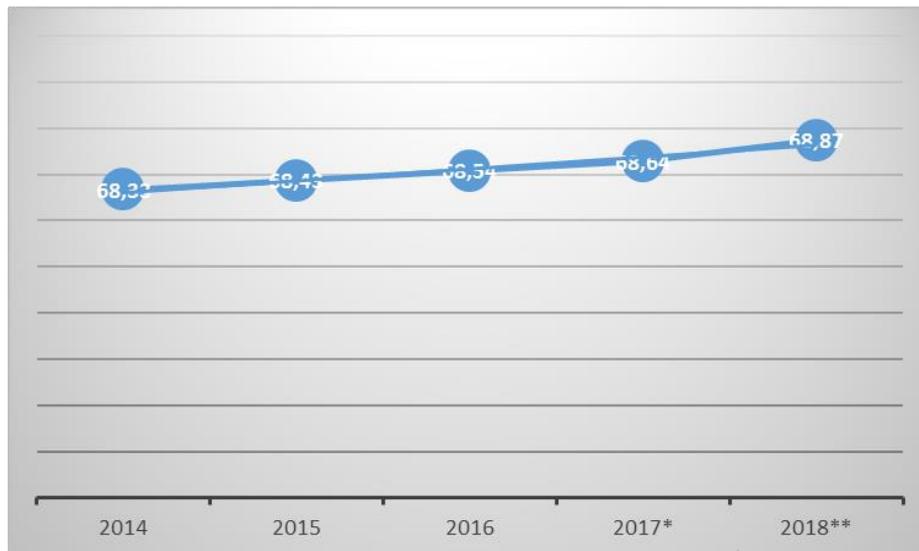
Karakteristik	Menggunakan Jaminan Kesehatan untuk Berobat Jalan
(1)	(2)
Jenis Kelamin	
Laki-laki	53.31
Perempuan	51.12
Kelompok Pengeluaran	
40 persen Terbawah	54.56
40 persen Tengah	45.10
20 persen Teratas	60.82
Kota Tidore Kepulauan	52.09

Sumber: SUSENAS Maret 2018

Dari tabel 9, dapat dilihat bahwa secara umum hanya 52,09 persen penduduk Kota Tidore Kepulauan yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Sementara sekitar 47 persen lainnya berobat jalan tanpa menggunakan jaminan kesehatan. Hal tersebut menunjukkan perlunya peningkatan akses dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan kesehatan dalam hal kemudahan mereka untuk berobat.

Dilihat dari karakteristik jenis kelamin, laki-laki memiliki persentase yang sedikit lebih tinggi yaitu 53,31 persen dalam hal penggunaan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Sementara itu, perempuan memiliki persentase 51,12 persen.

Sedangkan dilihat dari karakteristik pengeluaran, terdapat kecenderungan semakin tinggi pengeluaran, semakin tinggi pula kecenderungan orang untuk menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan. Masyarakat pada kelompok pengeluaran 40 persen terbawah yang menggunakan jaminan kesehatan untuk berobat jalan hanya sebesar 54,56 persen. Lebih rendah dibandingkan masyarakat kelompok pengeluaran 20 persen teratas yang 60,82 persen diantaranya berobat jalan menggunakan jaminan kesehatan. Hal tersebut tidak sejalan dengan tujuan utama jaminan kesehatan sebagai bantuan sosial seperti yang tertuang dalam undang-undang. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk menjamin akses masyarakat kelas bawah untuk memperoleh jaminan kesehatan.



Gambar 6. Angka Harapan Hidup Kota Tidore Kepulauan 2014-2018

Secara umum AHH menunjukkan kecenderungan peningkatan setiap tahun. Hal tersebut sejalan dengan berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat.

Pada tahun 2018, angka harapan hidup penduduk Tikep saat lahir sudah mencapai 68,87 Tahun. Nilai tersebut meningkat sebesar 0,23 persen dibandingkan 2017 yang mencapai 68,64 Tahun. Sedangkan dibandingkan tahun 2014, sudah terjadi kenaikan sebesar 0,54 tahun.

Dari Grafik di atas, terlihat bahwa peningkatan AHH paling besar terjadi pada tahun 2018. Pada periode tersebut AHH Penduduk Tikep mencapai 68,87 Tahun atau meningkat sebesar 0,34 persen dibandingkan tahun 2017.

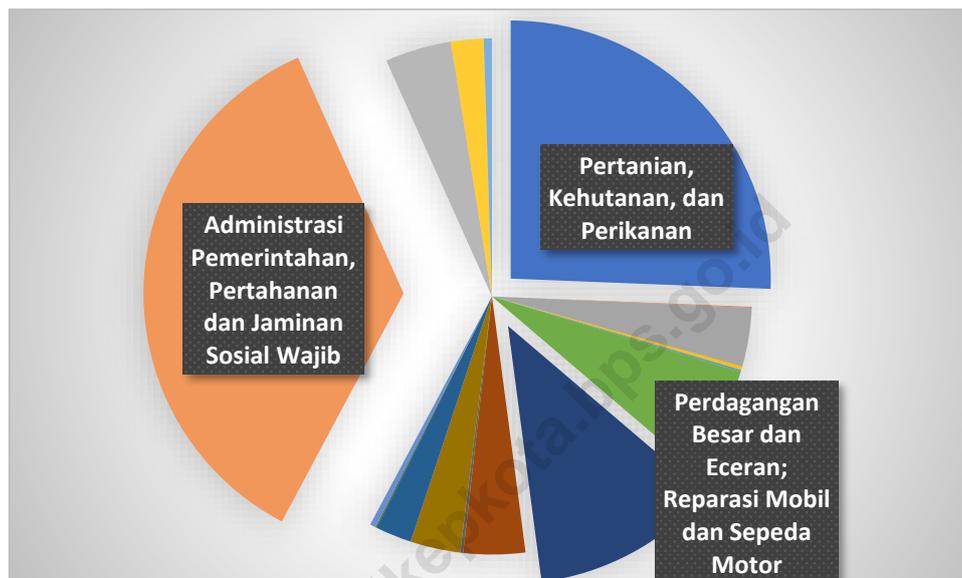
Capaian Pembangunan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sejauh ini merupakan salah satu indikator yang menarik untuk dilihat lebih jauh dalam melihat pembangunan ekonomi di Tidore Kepulauan. PDRB dan berbagai indikator turunan lainnya dapat menghasilkan banyak sekali informasi yang diperlukan dalam melihat perkembangan suatu perekonomian.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai gambaran perekonomian Kota Tidore Kepulauan, dimana perekonomian di wilayah ini ditopang utamanya oleh sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib. Hal tersebut terlihat dari

besarnya peran sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan jaminan sosial wajib dalam perekonomian.

Informasi mengenai peranan masing-masing lapangan usaha dapat menunjukkan bagaimana karakteristik perekonomian di Tidore Kepulauan. Informasi ini menjadi sangat penting karena terkait tentang bagaimana seharusnya pemerintah merumuskan kebijakan dengan memperhatikan karakteristik ekonominya.



Gambar 7. Peranan (Distribusi) PDRB Menurut Lapangan Usaha Tidore Kepulauan, 2018

Secara umum, kontribusi lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sangat dominan dalam penciptaan nilai tambah perekonomian di Tidore Kepulauan. Letak ibukota Provinsi Maluku Utara di wilayah Kecamatan Oba Utara mengakibatkan banyak aktivitas Pemerintahan Provinsi Maluku Utara yang terhitung sebagai PDRB Kota Tidore Kepulauan. Peranan lapangan usaha ini sekitar 36 persen dalam perputaran perekonomian di Tidore Kepulauan tahun 2018.

Kemudian lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar kedua. Peranan lapangan usaha ini hampir mencapai 25 persen terhadap perekonomian Tidore Kepulauan secara umum pada 2018. Aktivitas perkebunan tahunan menjadi yang paling dominan dalam penciptaan nilai ekonomi di lapangan usaha ini. Corak pertanian tersebut merupakan warisan nenek moyang seperti pala, cengkih dan kelapa.

Lapangan usaha Perdagangan dan Jasa reparasi menjadi penyumbang terbesar ketiga dengan peranan hampir 12 persen pada 2018. Meningkatnya peranan lapangan usaha ini tidak lepas dari upaya peningkatan akses pelabuhan dari Tidore Kepulauan yang

kembali menghidupkan geliat perekonomian melalui optimalisasi lapangan usaha perdagangan.

Diluar ketiga lapangan usaha tersebut, kontribusi lapangan usaha lain dalam perekonomian nilainya masih di bawah 10 persen. Hal tersebut menunjukkan banyak potensi perekonomian yang masih harus ditingkatkan di Tidore Kepulauan.

Tabel 10. Tabel PDRB Kota Tidore Kepulauan Menurut Indikator Tahun 2014-2018

Indikator	2014	2015	2016	2017*	2018**
Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
- ADHB	1,867.95	2,082.85	2,256.38	2,451.14	2,673.94
- ADHK	1,511.19	1,603.31	1,687.14	1,789.38	1,898.47
- Pertumbuhan PDRB ADHK 2010	6.16	6.10	5.23	6.06	6.10
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	19.50	21.48	22.98	24.67	26.63
- ADHK	15.77	16.53	17.18	18.01	18.91
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010	4.70	4.82	3.93	4.85	4.96
Jumlah Penduduk (jiwa)	95,813	96,979	98,206	99,337	100,415
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)	1.40	1.22	1.27	1.15	1.09

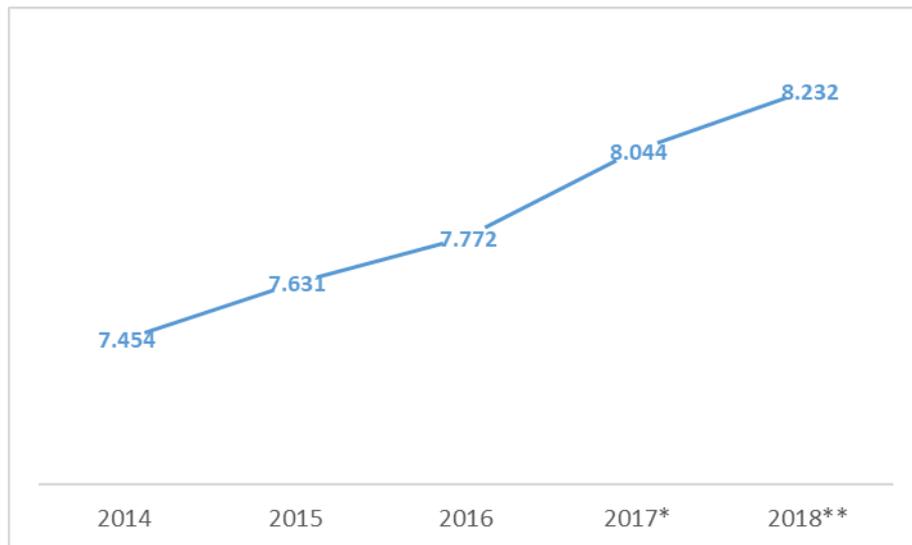
* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Seperti dapat dilihat pada tabel di atas, pertumbuhan ekonomi Kota Tidore Kepulauan kembali mengalami percepatan pada 2018. Pertumbuhan ekonomi 2018 tumbuh 6,10 persen dibandingkan periode sebelumnya. Hal tersebut dapat dipengaruhi beberapa hal salah satunya perbaikan iklim perekonomian secara umum.

Pertumbuhan ekonomi Kota Tidore Kepulauan pada 2018 didorong salah satunya pertumbuhan dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum. Lapangan usaha ini tumbuh hingga 11,31 persen. Hal tersebut juga yang mengakibatkan peranan lapangan usaha ini cenderung meningkat setiap tahunnya.

Lapangan usaha lain yang juga mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sektor jasa seperti jasa kesehatan dan jasa lainnya yang tumbuh sekitar 9 persen. Namun kecilnya peranan lapangan usaha tersebut mengakibatkan tingginya pertumbuhan belum mampu banyak mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum.



Gambar 8. Pengeluaran Per Kapita Kota Tidore Kepulauan 2014-2018

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa rata-rata pengeluaran per kapita penduduk di Tidore Kepulauan sejak 2014 hingga 2018 selalu meningkat. Pada 2018, nilai pengeluaran per kapita sudah mencapai Rp 8.232.000/Orang/Tahun. Nilai ini sudah jauh lebih tinggi jika dibandingkan 2014 yang hanya Rp 7.454.000/Orang /Tahun.

Selain itu, persentase penduduk miskin pada 2018 juga cenderung meningkat. Pada periode ini, persentase penduduk miskin mencapai 5,95 persen, lebih tinggi dari periode sebelumnya yang hanya 5,45 persen. Jika kita melihat lebih dalam lagi, hal tersebut diperparah dengan meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang menunjukkan bahwa masalah kesenjangan menjadi semakin serius di Tidore Kepulauan.

Kemiskinan dan kesenjangan bukan hanya menjadi ranah ekonomi, melainkan juga menjadi masalah sosial karena dapat mengganggu tatanan sosial masyarakat. Sehingga hal yang telah diuraikan di atas harus menjadi perhatian bagi pemerintah. Secara rata-rata pengeluaran naik dari tahun ke tahun, namun terdapat masalah kesenjangan yang semakin melebar diikuti dengan bertambahnya penduduk miskin.

Peningkatan pengeluaran per kapita masyarakat yang dalam hal ini menggambarkan rata-rata pengeluaran penduduk yang tidak sejalan dengan tingkat kemiskinan yang meningkat dan kesenjangan yang menurun. Hal ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah Kota Tidore Kepulauan.

Lampiran

Lampiran 1

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Kabupaten/ Kota	IPM				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Halmahera Barat	62,06	62,97	63,83	64,19	64,54
Halmahera Tengah	61,49	62,07	63,05	63,89	64,66
Kepulauan Sula	60,18	60,5	61,25	62,04	62,96
Halmahera Selatan	60,34	61,26	62,17	62,64	63,39
Halmahera Utara	64,18	65,04	66,02	66,52	67,30
Halmahera Timur	63,26	63,99	64,92	65,77	66,20
Pulau Morotai	58,34	59,27	59,87	60,71	61,39
Pulau Taliabu	57,31	58,26	58,66	59,03	59,67
Kota Ternate	77,15	77,64	77,8	78,48	79,13
Kota Tidore Kepulauan	66,76	67,45	68,37	69,25	69,89
MALUKU UTARA	65,18	65,91	66,63	67,20	67,76

Lampiran 2

**Angka Harapan Hidup
Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018**

Kabupaten/ Kota	AHH				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Halmahera Barat	65,15	65,35	65,45	65,55	65,78
Halmahera Tengah	62,20	62,40	62,60	62,80	63,16
Kepulauan Sula	62,29	62,39	62,50	62,60	62,83
Halmahera Selatan	64,93	65,03	65,11	65,20	65,42
Halmahera Utara	68,67	68,77	68,86	68,94	69,15
Halmahera Timur	67,19	67,49	67,67	67,85	68,19
Pulau Morotai	65,78	65,98	66,13	66,28	66,58
Pulau Taliabu	60,98	61,08	61,20	61,32	61,58
Kota Ternate	69,97	70,07	70,17	70,27	70,50
Kota Tidore Kepulauan	68,33	68,43	68,54	68,64	68,87
MALUKU UTARA	67,34	67,44	67,51	67,54	67,80

Lampiran 3

Harapan lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Kabupaten/ Kota	HLS				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Halmahera Barat	12,15	12,61	13,05	13,06	13,07
Halmahera Tengah	12,27	12,29	12,70	12,92	12,93
Kepulauan Sula	11,69	11,83	12,23	12,38	12,66
Halmahera Selatan	11,32	11,91	12,31	12,52	12,76
Halmahera Utara	12,29	12,69	13,06	13,22	13,58
Halmahera Timur	12,06	12,09	12,48	12,72	12,73
Pulau Morotai	10,92	11,59	11,92	12,17	12,41
Pulau Taliabu	10,96	11,48	11,73	11,87	12,14
Kota Ternate	14,66	15,05	15,06	15,30	15,72
Kota Tidore Kepulauan	13,09	13,27	13,74	13,90	13,91
MALUKU UTARA	12,72	13,10	13,45	13,56	13,62

Lampiran 4

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Kabupaten/ Kota	RLS				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Halmahera Barat	7,71	7,77	7,86	7,87	7,88
Halmahera Tengah	7,74	7,85	8,14	8,37	8,65
Kepulauan Sula	7,91	7,95	7,96	8,33	8,57
Halmahera Selatan	7,03	7,15	7,42	7,43	7,62
Halmahera Utara	7,98	8,06	8,35	8,36	8,37
Halmahera Timur	7,34	7,57	7,77	7,89	7,97
Pulau Morotai	6,84	6,84	6,88	6,89	6,96
Pulau Taliabu	7,4	7,41	7,42	7,43	7,44
Kota Ternate	11,11	11,12	11,13	11,25	11,26
Kota Tidore Kepulauan	8,72	8,91	9,11	9,39	9,63
MALUKU UTARA	8,34	8,37	8,52	8,61	8,72

Lampiran 5

Pengeluaran per Kapita Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara Tahun 2014-2018

Kabupaten/ Kota	Pengeluaran per kapita (Ribu Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017*	2018**
Halmahera Barat	6.697	6.889	7.076	7.266	7.418
Halmahera Tengah	7.130	7.359	7.481	7.688	7.885
Kepulauan Sula	6.491	6.545	6.741	6.859	7.044
Halmahera Selatan	6.704	6.791	6.894	7.026	7.156
Halmahera Utara	6.746	6.957	7.110	7.302	7.519
Halmahera Timur	7.212	7.410	7.560	7.841	7.969
Pulau Morotai	5.720	5.809	5.888	6.167	6.294
Pulau Taliabu	5.935	6.158	6.208	6.306	6.455
Kota Ternate	12.454	12.529	12.643	12.989	13.166
Kota Tidore Kepulauan	7.454	7.631	7.772	8.044	8.232
MALUKU UTARA	7.234	7.423	7.545	7.792	7.980

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

Jalan Sultan Syarifuddin Kelurahan Gamtufkange, Tidore

Telp : (0921) 3161629; Fax : (0921)3161629

Homepage : <http://tikepkota.bps.go.id>

Email : bps8272@bps.go.id